



# Collaborative Governance Pada Platform Patrakomala sebagai Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Bandung

Cut Afni Tassya<sup>1</sup>, Alya Zahra Rahayu<sup>2</sup>, Yuni Siti Andini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pasundan

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, khususnya bidang ekonomi kreatif, berkolaborasi dalam mengelola platform Patrakomala. Yang fungsinya untuk memfasilitasi kolaborasi multi-pihak untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Serta menganalisa lebih dalam, agar permasalahan mampu teridentifikasi dan dapat diatasi melalui pembuatan rekomendasi kebijakan, dalam prosesnya mempergunakan pendekatan *Collaborative Governance* berbasis teori Morse & Stephens, (2012:565-583) yang memiliki empat indikator yaitu 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deliberation, 4) Implementation. Penelitian ini menjelaskan proses yang melibatkan interaksi saling menguntungkan dan norma bersama antara aktor governance. Teori ini bertujuan untuk mencapai tujuan positif dari masing-masing pihak. Pada tahap inisiasi, proses pengembangan diawali dengan pendekatan kolaboratif, termasuk penyusunan roadmap ekonomi kreatif, pengesahan regulasi, serta forum diskusi seperti *Patrakomala Coffee Club* (PCC) yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dalam merumuskan program yang inklusif. Tahap deliberasi menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemangku kepentingan untuk membangun konsensus terkait pembagian peran, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi keberlanjutan. Implementasi program mencakup pengembangan *Patrakomala Creative Center*, inkubasi, eksibisi, serta peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, yang didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indeks ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Patrakomala berhasil meningkatkan integrasi ekosistem kreatif di Kota Bandung, dibuktikan dengan peningkatan indeks ekonomi kreatif hingga 99% di tingkat Jawa Barat. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pengembangan kapasitas, serta perluasan jejaring kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan program Patrakomala.

**Kata kunci:** Patrakomala, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pentahelix, Kota Bandung, Kolaborasi Lintas Sektor.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2235>

\*Correspondence: Cut Afni Tassya,  
Email: [cutafni39@gmail.com](mailto:cutafni39@gmail.com)

Received: 12-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 10-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to find out how the role of the Culture and Tourism Office of Bandung City, especially the creative economy sector, collaborates in managing the creative economy. Bandung City, especially the creative economy sector, collaborates in managing the Patrakomala platform. Patrakomala platform, whose function is to facilitate multi-stakeholder collaboration to support the development of the creative economy ecosystem. to support the development of the creative economy ecosystem. As well as analyzing more deeply in depth, so that problems can be identified and can be resolved through making policy recommendations, in the process of using the Collaborative Governance approach based on the Morse & Stephens theory, (2012: 565-583) which has four indicators, namely 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deliberation, 4) Implementation. This research explains the process that interactions and shared norms between governance actors. governance actors. This theory aims to achieve the positive goals of each party. At the initiation stage, the development process begins with a collaborative approach, including collaborative approach, including the drafting of a creative economy roadmap, the enactment of regulations, and discussion forums such as the Patrakomala Coffee Club (PCC), a regulations, as well as discussion forums such as the Patrakomala Coffee Club (PCC) which involves creative economy actors in formulating inclusive programs. involving creative economy actors in formulating inclusive programs. stage deliberation stage emphasizes the importance of open dialogue between stakeholders to build consensus regarding the division of roles, allocation of resources, and development of sustainability strategies. development of

---

*sustainability strategies. Program implementation includes the development of Patrakomala Creative Center, incubation, exhibition, as well as competency improvement for creative economy creative economy actors, supported by mechanized*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Creative Economy, Patrakomala, Multi-Stakeholder Collaboration, Bandung City.*

---

## **Pendahuluan**

Ekonomi kreatif telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Hal ini mengacu pada sektor-sektor yang berbasis pada kreativitas, pengetahuan dan keterampilan individu untuk menghasilkan nilai tambah, seperti seni, desain, musik, film, fashion dan kuliner. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan budaya dan identitas daerah. Kota Bandung memiliki landasan yang solid untuk menjadi kota kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang langkah signifikan Kota Bandung dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Perda ini lahir sebagai respon terhadap potensi besar sektor ekonomi kreatif yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya. Serta keputusan Wali Kota (Kepwal) Bandung Nomor 556/kep.398-disbudpar/2022 Tentang Komite Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung Periode 2022-2025.

Sebagai salah satu kota dengan branding "Kota Kreatif", Bandung menghadapi tantangan dalam memfasilitasi pelaku industri kreatif untuk tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu inisiatif strategis yang dihadirkan pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif adalah Patrakomala, sebuah platform digital yang dirancang sebagai ekosistem kolaboratif. Platform ini bertujuan untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan peluang pasar, pembinaan, dan program-program strategis yang relevan. Namun, keberhasilan platform ini tidak hanya bergantung pada desain teknologinya, tetapi juga pada penerapan tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dengan mengembangkan Patrakomala, sebuah platform berbasis digital yang dirancang untuk memperbaiki sistem administrasi, pelayanan publik, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Platform ini diimplementasikan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung untuk mempercepat proses digitalisasi sektor kebudayaan dan pariwisata yang sangat penting bagi perekonomian dan identitas kota tersebut. Disbudpar Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola potensi kebudayaan dan pariwisata sebagai sektor yang mendukung pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengoptimalkan pengelolaan data, serta memastikan tercapainya akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan program-program kebudayaan dan pariwisata.

Dalam pengelolaan kebijakan, pendekatan *collaborative governance* menjadi bagian yang semakin penting untuk diimplementasikan. Serta sebagai kerangka kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara bersama-sama, guna mencapai tujuan yang lebih efektif dan inklusif. Pendekatan ini relevan dengan konsep kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh James E. Anderson dalam (Irfan Islamy, 2000: 17), yang menekankan pada serangkaian tindakan nyata untuk memecahkan masalah tertentu. Melalui pelibatan stakeholder juga mencerminkan perbedaan antara kebijakan (*policy*), yang bersifat strategis dan terencana, dengan keputusan (*decision*), yang lebih bersifat teknis dan operasional, sebagaimana diungkapkan oleh Budi Winarno. Melalui sinergi antara berbagai pihak, *collaborative governance* memungkinkan kebijakan untuk lebih responsif, adaptif, dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan kompleks.

Namun seringkali perbedaan perspektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya muncul karena fokus, tujuan, dan pendekatan masing-masing pihak sering kali tidak selaras. Pemerintah cenderung berorientasi pada kebijakan formal, regulasi, dan pencapaian target pembangunan dengan pendekatan top-down, yang terkadang kurang fleksibel terhadap kebutuhan spesifik pelaku usaha, komunitas, atau sektor lainnya. Sementara itu, pemangku kepentingan seperti pelaku usaha lebih berfokus pada efisiensi dan profitabilitas, komunitas mengutamakan nilai-nilai sosial dan budaya, akademisi berpikir ilmiah dengan jangka panjang, dan media cenderung menonjolkan isu-isu yang menarik perhatian publik. Selain perbedaan perspektif, keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala utama. Pemerintah sering kali memiliki pemahaman terbatas tentang dinamika sektor ekonomi kreatif, sementara pelaku usaha dan komunitas tidak sepenuhnya memahami regulasi atau mekanisme kerja pemerintah. Hal ini menciptakan kesenjangan koordinasi, implementasi kebijakan yang tidak efektif, dan hilangnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, kolaborasi pentahelix yang diharapkan menjadi solusi integratif justru terhambat oleh ketidaksepahaman dan ketidakseimbangan informasi.

Berdasarkan permasalahan terkait peneliti tertarik untuk dilakukannya penelitian menggunakan teori proses *collaborative governance* yang disimpulkan oleh Ricardo S. Morse & John B. Stephens dalam jurnalnya yang berjudul *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning* (2012: 565-583), berikut empat tahap dalam proses *collaborative governance* dalam Morse & Stephens, antara lain:

1. *Assessment*

Tahap ini berkaitan dengan kondisi awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kemitraan antara stakeholder. Selain itu, tahap ini akan memberikan penilaian apakah kolaborasi diperlukan dan apakah kolaborasi memungkinkan untuk dilaksanakan.

2. *Initiation*

Tahap *Initiation* dimana setelah jelas bahwa diperlukannya suatu kolaborasi, maka tahap ini akan dilaksanakan dengan melibatkan, antara lain: mengidentifikasi convener dan peran sponsor yang mungkin akan menjadi sumber daya manusia dan

sumber dana; dan mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kelompok kerja dalam *process design*. Tahap initiation menekankan "soft skill" untuk mengadakan, membangun hubungan dan membangun sebuah tim.

### 3. *Deliberation*

Tahap *deliberation*, yaitu menetapkan aturan dasar, musyawarah dan dialog antara stakeholder sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan; dan mencapai perjanjian Kerjasama. Setelah para stakeholder dengan kemitraannya memutuskan hasil dan strategi,

### 4. *Implementation*

Dalam tahap implementation diperlukan beberapa komponen yang akan mendukung, antara lain: "perancangan struktur pemerintahan; mendukung daerah yang dipilih atau menemukan "pemenangan" lainnya, monitoring perjanjian dan komitmen kerjasama, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan. Melihat adanya tahap-tahap *collaborative governance*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari setiap tahapan proses kolaboratif menekankan set yang berbeda. *Assessment* membutuhkan kemampuan analisis, *initiation* adalah tentang jaringan dan persuasi, *deliberation* melibatkan dinamika kelompok dan keterampilan proses lainnya dan *implementation* melibatkan konstelasi "manajemen jaringan" kompetensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan *collaborative governance* pada platform Patrakomala dapat mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, efektivitas digitalisasi, serta tantangan dan peluang dalam implementasi *collaborative governance*. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan peran Patrakomala sebagai alat pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat branding Kota Bandung sebagai "Kota Kreatif".

## Metodologi

Peneliti menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dianggap paling tepat, mengingat topik permasalahan yang diangkat. Peneliti berupaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami situasi serta kondisi yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data maupun dokumen, serta wawancara, akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk narasi dan bahasa yang jelas. Menurut Creswell (2010) dalam karya Jamaluddin Ahmad yang berjudul *Metode Penelitian Administrasi Publik*, penelitian kualitatif memiliki karakteristik tertentu.

Teori dan Aplikasi menyatakan bahwa terdapat metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok. Menurut Supriati (2012: 38) objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bandung, dengan memfokuskan penelitian ini pada platform Patrakomala sebagai alat untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dimaksudkan untuk mendapat keterangan yang lebih mendalam melalui tanya jawab, sambil bertatap muka antara penannya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir: 2003: 194).

Wawancara mendalam dilakukan dengan stakeholder terkait yang memiliki posisi sebagai Ketua Sub Koordinator Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi Bidang Ekonomi Kreatif sebagai informan utama. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan dari 14 Oktober – 14 Desember 2024. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Morse & Stephens (2012:565-583) yang memiliki empat indikator, yaitu 1) *Assesment*, 2) *Initiatons*, 3) *Deliberation*, dan 4) *Implementation*. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer, sebagai perolehan data melalui hasil wawancara dengan informan sebagai narasumber terkait data yang diperlukan.
2. Data Sekunder, sebagai data pendukung yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi dokumen Patrakomala DISBUDPAR, serta Laporan Akhir Indeks Kota Kreatif Bandung 2023.

## Hasil dan Pembahasan

### *Assesment* (Penilaian Awal)

Latar belakang pendirian platform Patrakomala berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi dalam pemetaan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Sebelum pelaksanaan platform ini, terdapat kurangnya pengorganisasian yang sistematis terhadap potensi ekonomi kreatif, serta keterbatasan data yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang informatif dan strategis. Dalam konteks ini, Patrakomala berfungsi sebagai *Creator Hub* yang dirancang untuk mendukung keberagaman subsektor ekonomi kreatif, memperkuat integrasi di antara berbagai elemen yang terlibat, dan memastikan efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, platform ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan dalam menciptakan manfaat *manfaat* bagi komunitas kreatif di Kota Bandung, sekaligus mendorong dinamika ekonomi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebelum implementasi platform Patrakomala, ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung ditandai oleh kondisi terfragmentasi, di mana setiap elemen beroperasi secara mandiri tanpa adanya integrasi yang signifikan antar sektor. Para pelaku kreatif cenderung terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka saja, yang berdampak pada minimnya kolaborasi dan sinergi di antara mereka. Keadaan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terencana untuk menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem, sehingga dapat menciptakan kerjasama yang saling mendukung dan berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif. Upaya untuk membangun jaringan kolaboratif

ini menjadi sangat penting dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi kreatif secara holistik dan berkelanjutan di Kota Bandung.

Patrakomala, pemangku kepentingan utama terdiri dari lima elemen pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas kreatif, dunia bisnis, akademisi, dan media. Setiap elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan dinamis. Pemerintah berperan sebagai regulator yang mengatur kebijakan dan menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengembangan sektor ini. Komunitas kreatif bertindak sebagai akselerator, yang berkontribusi pada inovasi dan perkembangan ide-ide baru. Dunia bisnis berperan sebagai enabler, memberikan dukungan dan fasilitas yang memungkinkan perkembangan sektor ekonomi kreatif. Akademisi berfungsi sebagai konseptor, menghasilkan pengetahuan dan riset yang mendasari strategi-strategi pengembangan sektor tersebut. Terakhir, media berperan sebagai katalisator, yang memperkenalkan dan mempromosikan produk serta potensi ekonomi kreatif kepada publik. Sinergi antara kelima elemen ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Sebelum kolaborasi dimulai, tingkat kepercayaan antara pemerintah, komunitas kreatif, dan sektor swasta masih tergolong rendah. Setiap segmen pemangku kepentingan ini belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan ekspektasi, dan fungsi masing-masing belum tersegmentasi dengan jelas. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan peran ini menyebabkan terhambatnya pembentukan kolaborasi yang efektif, mengingat kurangnya pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dan kontribusi yang harus diberikan oleh setiap pihak. Hambatan-hambatan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing pihak untuk mewujudkan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan.

Sejumlah tantangan yang dihadapi sebelum memulai kolaborasi dalam program Patrakomala, baik dari segi teknis maupun sosial. Dari perspektif teknis, tantangan utama terletak pada proses transfer pengetahuan kepada pemangku kepentingan yang sering terhambat oleh perbedaan kapasitas, ketersediaan teknologi pendukung, serta kompleksitas koordinasi antar pihak yang terlibat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti pendanaan dan waktu, juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, dalam aspek sosial, perbedaan visi antar pihak terkait, variasi tingkat komitmen, serta adanya resistansi dari komunitas lokal dapat mengganggu terciptanya sinergi yang efektif, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan program. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut.

### ***Initiation (Inisiasi)***

Proses awal pembentukan Patrakomala diawali dengan sebuah inovasi yang menitikberatkan pada city branding, bertujuan untuk memperkuat identitas, integritas, dan citra Kota Bandung sebagai kota kreatif. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menggali DNA Kota Bandung melalui pendekatan kolaboratif, yang mencerminkan karakteristik unik dan potensi kreatif yang dimiliki oleh kota tersebut. Pendekatan ini tidak

hanya berfokus pada pemetaan identitas lokal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan sebuah visi bersama. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah Roadmap ekosistem ekonomi kreatif yang menjadi panduan dalam pengembangan sektor kreatif secara berkelanjutan, dengan harapan dapat memaksimalkan potensi kreatif Bandung dan meningkatkan daya saingnya di tingkat regional maupun global.

Dalam tahap inisiasi program Patrakomala, berbagai rapat koordinasi diselenggarakan dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan visi di antara para pemangku kepentingan, merumuskan rencana kerja strategis, serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang mendalam terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi program. Proses koordinasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Patrakomala, dengan mengedepankan sinergi lintas sektor yang efektif.

Aturan atau kesepakatan awal yang dirancang untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif yaitu dengan langkah awal dalam implementasi program Patrakomala dengan pengesahan Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum yang mengatur sistem informasi dan mekanisme pembentukan program tersebut. Regulasi ini berperan penting sebagai pedoman utama yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya di antara para pemangku kepentingan. Dengan adanya aturan ini, kolaborasi antara pihak dapat berjalan secara efektif dan terarah, sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerapkan prinsip inklusivitas dalam tahap inisiasi program Patrakomala dengan menyelenggarakan forum diskusi yang dikenal sebagai *Patrakomala Coffee Club* (PCC). Forum ini dirancang sebagai ruang interaksi yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan program. Melalui PCC, berbagai pihak diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan, berbagi gagasan inovatif, serta memberikan masukan yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang konstruktif untuk mendukung keberhasilan program secara menyeluruh.

Komunitas kreatif memainkan peran yang signifikan dalam memberikan masukan terhadap rancangan program Patrakomala, khususnya melalui partisipasi aktif mereka dalam forum *Patrakomala Coffee Club* (PCC). Forum ini menjadi platform kolaboratif yang memungkinkan para pelaku ekonomi kreatif untuk menyampaikan ide-ide inovatif, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta mengusulkan solusi yang berakar pada kebutuhan spesifik subsektor ekonomi kreatif yang mereka representasikan. Keterlibatan ini menunjukkan kontribusi strategis komunitas kreatif dalam memastikan bahwa rancangan program Patrakomala dapat menjawab tantangan riil di lapangan dan mendukung pengembangan kreatif secara berkelanjutan.

### ***Deliberation (Musyawarah atau Pengambilan Keputusan)***

Mekanisme dialog antara pemerintah, komunitas kreatif, dan sektor swasta dalam pengembangan program Patrakomala dilakukan melalui forum terbuka seperti *Patrakomala Coffee Club (PCC)* dan rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum-forum ini berfungsi sebagai ruang kolaboratif yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh elemen pentahelix untuk bertukar pandangan, membangun konsensus, serta menyelesaikan perbedaan pandangan secara inklusif dan konstruktif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan sinergi yang kuat di antara para pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program.

Tahap musyawarah dalam pengembangan program Patrakomala berfokus pada pembahasan isu-isu utama yang mencakup identifikasi kebutuhan subsektor ekonomi kreatif serta strategi untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi kreatif Kota Bandung. Diskusi ini dirancang untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi kreatif, yang menjadi inti dari daya tarik pariwisata kota. Pembahasan tersebut juga berkontribusi pada penguatan ekonomi kreatif sebagai produk unggulan pariwisata Kota Bandung, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan.

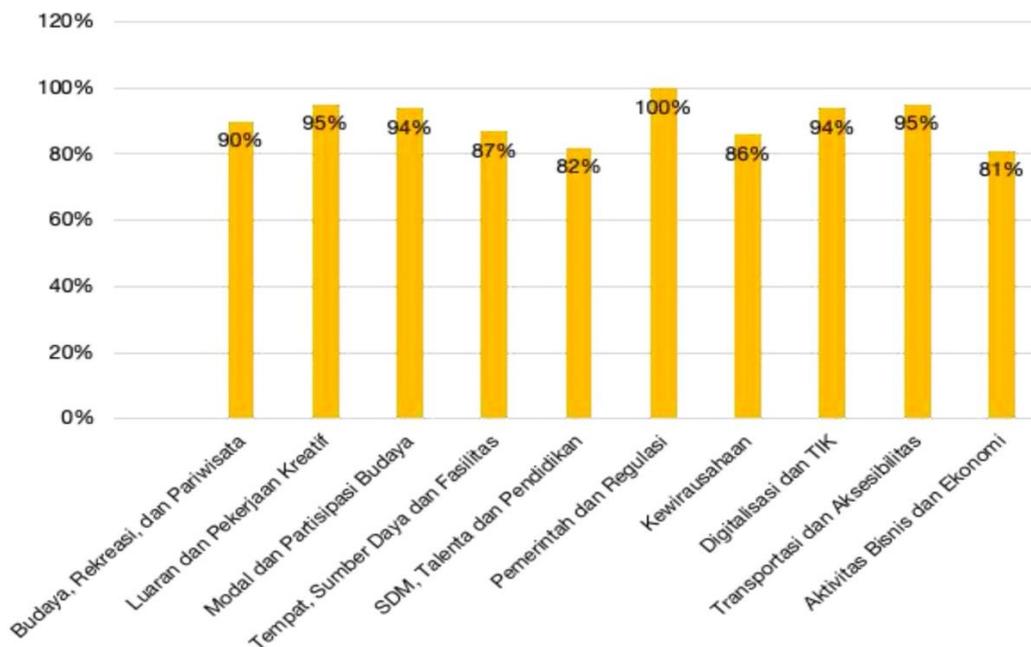
Kesepakatan mengenai pembagian peran, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan program Patrakomala dicapai melalui pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang menjadi dasar hukum utama. Regulasi ini dirancang untuk memastikan setiap pihak dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Pengesahan Peraturan Wali Kota yang mengatur sistem informasi Patrakomala merupakan langkah awal dalam menetapkan mekanisme pembentukan sistem tersebut. Selanjutnya, diperlukan keputusan tambahan dari Wali Kota yang secara khusus mengatur peran masing-masing pihak dalam konteks kebijakan kota Bandung. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terarah untuk mendukung implementasi program secara optimal.

Proses kesepakatan dalam pembagian peran, sumber daya, dan tanggung jawab di antara para pihak dalam program Patrakomala menghadapi tantangan berupa perbedaan perspektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam regulasi formal melalui pengesahan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur peran serta mekanisme kolaborasi. Perda tersebut menjadi landasan hukum yang mengakomodasi beragam pandangan, termasuk perspektif pemerintah, yang dituangkan dalam bentuk aturan rinci. Sebagai contoh, terdapat 14 pasal dalam Perda yang memerlukan tindak lanjut dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal), sehingga menghasilkan kerangka kerja yang jelas dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan program.

Proses deliberasi dalam pelaksanaan program Patrakomala menghadapi tantangan utama berupa perbedaan perspektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan ini diselesaikan dengan mengintegrasikan berbagai pandangan ke dalam regulasi formal melalui pengesahan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik

mengatur peran dan mekanisme kolaborasi. Regulasi ini dirancang untuk mengikat perspektif pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka hukum yang jelas. Sebagai bagian dari implementasi Perda, sebanyak 14 pasal di dalamnya memerlukan tindak lanjut dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal), sehingga dapat menjadi pedoman yang konkrit dan terarah bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memastikan bahwa konflik perspektif dapat diatasi secara sistematis melalui landasan hukum yang kuat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam musyawarah mencerminkan kebutuhan seluruh pihak dengan melakukan survei untuk mengukur indeks ekonomi kreatif. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan inklusivitas dan relevansi dengan kebutuhan nyata berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses ini, indeks ekonomi kreatif (IKK) menjadi alat komparasi yang berguna untuk menilai keberhasilan dan dampak kebijakan. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2023, Kota Bandung memperoleh nilai yang sangat baik, yaitu 90,4 atau mencapai 99% di tingkat Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di kota tersebut telah berhasil dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terdiri dari berbagai pihak. Indeks ini juga menjadi indikator penting dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif, yang telah diperbandingkan dengan 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.



**Gambar 1.** Rata-rata Nilai Indikator Kota Bandung 2023

Sumber : Laporan Akhir Indeks Kota Kreatif Bandung 2023

### **Implementation (Pelaksanaan)**

Implementasi *Patrakomala* dilakukan melalui serangkaian program strategis yang mencakup *Patrakomala Creative Center (PCC)*, inkubasi, pameran, sosialisasi, dan peningkatan kompetensi. Program-program ini dirancang untuk mendukung pengembangan subsektor kreatif dengan memberikan wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berinovasi, memperluas jejaring, dan meningkatkan kapasitas mereka. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, *Patrakomala* tidak hanya menjadi platform pengembangan kreatif, tetapi juga alat untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayahnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi platform *Patrakomala* berjalan sesuai rencana. Selain fokus pada pembangunan teknologi, dinas ini juga membangun jejaring (*hub*) melalui berbagai kegiatan seperti *Patrakomala Creative Center (PCC)*, inkubasi, pameran, sosialisasi, dan pengembangan kompetensi. Untuk mendukung keberlanjutan program, alokasi anggaran tahunan menjadi prioritas yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan regulasi keuangan daerah. Dinas juga aktif mempromosikan *Patrakomala* melalui partisipasi dalam kompetisi inovasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini menghasilkan sejumlah penghargaan bergengsi, seperti masuk *Top 99* Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB pada tahun 2021, menjadi salah satu pemenang *Innovative Government Award (IGA)* dari Kemendagri pada tahun 2022, serta pengakuan dari sektor swasta melalui penghargaan MarkPlus. Semua langkah ini mencerminkan komitmen dinas dalam memperkuat ekosistem kreatif secara berkelanjutan.

Koordinasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program dilakukan melalui mekanisme rapat reguler, forum dialog, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan ruang yang setara untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Dengan demikian, program-program yang dijalankan dapat berjalan secara sinergis, menciptakan kolaborasi yang efektif dan mendukung terciptanya ekosistem kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan, sehingga mampu mendorong keberhasilan implementasi program.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan *Patrakomala* dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur, mencakup survei indeks ekonomi kreatif, penyusunan laporan kegiatan, dan pengukuran dampak terhadap ekosistem kreatif. Survei indeks ekonomi kreatif digunakan untuk mengukur perkembangan dan kontribusi sektor kreatif secara kuantitatif, sementara laporan kegiatan memberikan gambaran tentang pelaksanaan program secara kualitatif. Hasil dari kedua metode ini dikombinasikan dengan analisis dampak ekosistem kreatif untuk mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang, sehingga memastikan keberlanjutan dan relevansi *Patrakomala* dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Dampak awal dari implementasi *Patrakomala* terhadap ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung menunjukkan hasil yang signifikan, ditandai dengan peningkatan indeks ekonomi kreatif hingga mencapai 99% di tingkat Jawa Barat. Capaian ini mencerminkan keberhasilan *Patrakomala* dalam memperkuat ekosistem kreatif di kota tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan terciptanya sinergi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas kreatif, dan sektor swasta. Keberhasilan ini menjadi indikator positif terhadap efektivitas program *Patrakomala* dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif.

## Kesimpulan

*Patrakomala* merupakan inisiatif strategis yang lahir dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Pada tahap *Assessment*, ditemukan bahwa ekosistem kreatif di kota ini masih terfragmentasi, dengan rendahnya tingkat kolaborasi di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *Patrakomala* dirancang sebagai platform yang menghubungkan elemen-elemen pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas kreatif, dunia bisnis, akademisi, dan media, untuk menciptakan integrasi yang inklusif dan dinamis. Melalui tahap *Initiation*, pendekatan kolaboratif diterapkan, melibatkan perumusan roadmap ekonomi kreatif, pengesahan regulasi, dan forum diskusi seperti *Patrakomala Coffee Club* untuk menyelaraskan visi bersama. Pada tahap *Deliberation*, proses pengambilan keputusan dilakukan secara inklusif melalui dialog dan regulasi formal, seperti Perda dan Perwal, untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak. Tahap *Implementation* diwujudkan melalui program-program strategis, seperti *Patrakomala Creative Center*, inkubasi, dan peningkatan kompetensi, yang telah berhasil meningkatkan indeks ekonomi kreatif Kota Bandung hingga 99% di tingkat Jawa Barat. Kesuksesan *Patrakomala* menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur, didukung oleh regulasi dan pengelolaan yang baik, mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian *Collaborative Governance* Pada Platform *Patrakomala* sebagai Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kolaborasi Pentahelix, perlu adanya penguatan mekanisme kolaborasi di antara elemen pentahelix melalui platform komunikasi yang lebih terintegrasi. Dengan mengadakan *Forum Grup Discussion* (FGD) yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan diperlukan program pelatihan yang berkesinambungan bagi pemangku kepentingan, terutama dalam hal transfer pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan ekosistem ekonomi kreatif.
3. Peningkatan Kesadaran Publik, Perlu adanya kampanye edukasi dan promosi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi kreatif dan program *Patrakomala*, melalui

4. Apabila 3 rekomendasi diatas belum mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan refleksi dan evaluasi strategi lebih lanjut serta upaya segmentasi audiens yang sesuai dengan sasaran serta tujuan program.

## Referensi

- Adamsone-Fiskovica, A. (2022). Knowledge production and communication in on-farm demonstrations: putting farmer participatory research and extension into practice. *Journal of Agricultural Education and Extension*, 28(4), 479-502, ISSN 1389-224X, <https://doi.org/10.1080/1389224X.2021.1953551>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. (2023). *Laporan akhir indikator kota/kabupaten kreatif Jawa Barat tahun 2023*. Bandung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Eweje, G. (2021). Multi-stakeholder partnerships: a catalyst to achieve sustainable development goals. *Marketing Intelligence and Planning*, 39(2), 186-212, ISSN 0263-4503, <https://doi.org/10.1108/MIP-04-2020-0135>
- Hovardas, T. (2021). Social sustainability as social learning: Insights from multi-stakeholder environmental governance. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14), ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/su13147744>
- Jones, J.L. (2022). Understanding barriers to collaborative governance for the food-energy-water nexus: The case of Phoenix, Arizona. *Environmental Science and Policy*, 127, 111-119, ISSN 1462-9011, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.025>
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Looman, W. (2021). Drivers of successful implementation of integrated care for multi-morbidity: Mechanisms identified in 17 case studies from 8 European countries. *Social Science and Medicine*, 277, ISSN 0277-9536, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113728>
- Luthra, S. (2022). Overcoming barriers to cross-sector collaboration in circular supply chain management: a multi-method approach. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 157, ISSN 1366-5545, <https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102582>
- Maulana, M. F. A., Putri, S. W., & Ariesmansyah, A. (2024). *Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 4986-5004.
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review. *Environmental Science and Policy*, 151, ISSN 1462-9011, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627>
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nusantara, R. S. B. (2024). CITY BRANDING KOTA BANDUNG MELALUI PLATFORM PATRAKOMALA DI BIDANG EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
- Olmedo, L. (2022). Community-Based Social Enterprises as Actors for Neo-Endogenous Rural Development: A Multi-Stakeholder Approach<sup>☆</sup>. *Rural Sociology*, 87(4), 1191-1218, ISSN 0036-0112, <https://doi.org/10.1111/ruso.12462>
- Pemerintah Kota Bandung. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Ruijter, E. (2023). Smart Governance Toolbox: A Systematic Literature Review. *Smart Cities*, 6(2), 878-896, ISSN 2624-6511, <https://doi.org/10.3390/smartcities6020042>
- Shan, S.n. (2023). Analysis of collaborative urban public crisis governance in complex system: A multi-agent stochastic evolutionary game approach. *Sustainable Cities and Society*, 91, ISSN 2210-6707, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104418>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Suherman, D., Aliya, S., Ariesmansyah, A., & Khaulani, D. G. (2022). Patrakomala as Bandung City Government Innovation in Reorganizing the Creative Economy Post-Covid-19 Pandemic. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 145-158.
- Supriati. (2012). *Objek Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wali Kota Bandung. (2022). *Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep.398-Disbudpar/2022 tentang Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung Periode 2022-2025*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Wicaksono, F., & Bustomi, R. H. COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KREATIVITAS MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG.
- YUNIAR, D. M. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).